

Membangun karakter anti korupsi melalui pendidikan kewarganegaraan

Muhammad Rohidussyafiq

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250503110102muhammadrohidussyafiq@gmail.com

Kata Kunci:

Pendidikan kewarganegaraan;
anti korupsi; pendidikan
karakter; integritas; Pancasila.

Keywords:

Civic education; anti corruption;
character education; integrity;
Pancasila.

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara, tetapi juga merusak moral bangsa, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan karakter. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter anti

korupsi pada generasi muda. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber terkait pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, dan nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, integritas, dan kepedulian sosial. Integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan nilai-nilai keagamaan dapat memperkuat kesadaran moral siswa terhadap bahaya korupsi. Selain itu, penerapan metode pembelajaran kontekstual dan berbasis nilai mampu membantu siswa menginternalisasi perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam menciptakan generasi yang berkarakter kuat, berintegritas, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that has broad impacts on social, political, economic, and educational life in Indonesia. Corrupt practices not only cause financial losses to the state but also damage national morality, reduce public trust, and hinder national development. Therefore, preventive efforts are needed not only through law enforcement but also through character education. This article aims to analyze the role of Civic Education in developing anti-corruption character among the younger generation. The method used in this study is a literature review by examining various sources related to anti-corruption education, character education, and Pancasila values. The findings show that Civic Education plays a strategic role in instilling values of honesty, responsibility, discipline, integrity, and social awareness. The integration of anti-corruption education into learning activities, school culture, and religious values can strengthen students' moral awareness regarding the dangers of corruption. In addition, the implementation of contextual and value-based learning methods helps students internalize anti-corruption behavior in their daily lives. Therefore, Civic Education serves as an important instrument in creating a generation with strong character, integrity, and the ability to contribute to building a clean and corruption-free society.



Pendahuluan

Korupsi tetap menjadi isu krusial di Indonesia, dengan implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, dan birokrasi. Terlepas dari implementasi berbagai inisiatif pemberantasan, praktik korupsi tetap ada di berbagai lembaga dan cenderung berulang. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, melainkan masalah yang kompleks dan sistemik. Dampak korupsi sangat merusak, berpotensi melemahkan struktur sosial, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghambat pembangunan nasional.

Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan moral dan etika yang timbul dari rendahnya integritas, tanggung jawab, dan kejujuran di tingkat individu dan negara. Ketika kepentingan pribadi diprioritaskan di atas kepentingan publik, perilaku korupsi menjadi sulit dihindari. Pada kenyataannya, korupsi berpotensi merusak karakter generasi muda karena dapat dinormalisasi sebagai fenomena umum jika terjadi secara terus-menerus dalam konteks sosial. Oleh karena itu, penanganan masalah korupsi tidak dapat dibatasi hanya pada penegakan hukum saja, tetapi juga membutuhkan pendekatan moral dan penguatan pendidikan karakter yang kuat (Abqoriya, 2025).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mengembangkan karakter anti-korupsi melalui internalisasi nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab warga negara. Nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengembangkan sikap jujur, adil, dan berintegritas. Melalui proses pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan merupakan strategi penting dalam mengembangkan generasi yang berkarakter kuat dan mampu mencegah serta memerangi korupsi di masa depan.

Korupsi di Indonesia bukan hanya bersifat struktural, melainkan telah berkembang menjadi isu budaya yang bersifat turun-temurun dan berlanjut lintas generasi. Praktik korupsi telah ada sejak zaman kerajaan hingga masa kini, menciptakan pola perilaku yang sulit dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial. Situasi ini semakin diperparah oleh berbagai faktor, seperti budaya patrimonialisme, memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, dan rendahnya integritas moral individu. Tidak hanya itu, implikasi korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara tetapi juga mencakup degradasi moral nasional, penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan penghambatan pembangunan nasional. Dari hal ini, korupsi tidak lagi dapat direduksi menjadi sekadar pelanggaran hukum, melainkan krisis karakter yang membutuhkan tindakan komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pendidikan merupakan instrumen strategis utama, khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan, yang menekankan pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Pendidikan anti-korupsi dianggap penting karena tidak hanya memberikan pemahaman tentang risiko korupsi tetapi juga

menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas pada siswa sejak usia dini. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pengembangan karakter anti-korupsi, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan sikap kritis dan etis dalam konteks kehidupan sosial dan nasional. Oleh karena itu, mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum kewarganegaraan merupakan strategi pencegahan yang efektif untuk mengembangkan generasi dengan karakter kuat yang mampu menangkal korupsi di masa depan.

Pembahasan

Korupsi merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan besar di Indonesia, karena berdampak signifikan pada berbagai dimensi kehidupan, termasuk politik, ekonomi, masalah sosial, dan pendidikan. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara tetapi juga merusak integritas moral bangsa dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang berpotensi merusak fondasi demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum jika tidak dicegah melalui strategi yang sistematis dan berkelanjutan (Nanggala, 2020). Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dibatasi hanya pada penegakan hukum saja, tetapi juga membutuhkan pendidikan karakter yang efektif dalam membentuk individu yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.

Pendidikan kewarganegaraan penting diterapkan dalam mengembangkan karakter anti-korupsi, karena mewujudkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, moralitas, dan tanggung jawab warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengembangkan generasi muda dengan pemikiran kritis, rasa tanggung jawab, dan keberanian untuk menghadapi ancaman korupsi (Mimin Ninawati, Arifatul Adawiyah, Ike Nuryolanda, Maura Febriyanti Zulkarnain, Siti Afifah Fadhilah, 2025). Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan, tetapi juga dibimbing untuk menyadari esensi integritas dan budaya anti korupsi dalam konteks kehidupan sosial dan nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai moral pada siswa. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan warga negara yang berkualitas, cerdas, demokratis, dan berkarakter Pancasila (Nanggala, 2020). Nilai-nilai ini sangat relevan dengan pengembangan sikap anti korupsi, karena perilaku korupsi berakar pada kurangnya moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab individu. Dalam hal ini, pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah perkembangan perilaku korupsi sejak usia dini.

Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan melalui beberapa hal, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, dan kesadaran sosial. Nilai-nilai ini selaras dengan sembilan nilai anti korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat diterapkan dengan nilai-nilai tersebut melalui berbagai metode, seperti pembelajaran kontekstual, diskusi kasus korupsi, penanaman disiplin, dan pemberian teladan oleh pendidik atau guru. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami bahaya korupsi secara teoritis tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila juga berperan krusial sebagai landasan moral dalam mengembangkan karakter anti-korupsi. Setiap prinsip Pancasila mewujudkan nilai-nilai yang sangat berkaitan dengan perilaku anti-korupsi, seperti integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan Bersama (Nadhifah, 2026). Prinsip Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menanamkan nilai-nilai moral dan rasa percaya, prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, sedangkan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan merupakan langkah strategis dalam membangun budaya anti korupsi.

Dalam lingkungan pendidikan, pendidikan anti-korupsi dapat diimplementasikan melalui pengintegrasian nilai-nilai integritas ke dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah. Pendidikan anti-korupsi melampaui pengajaran teoritis dan mencakup penanaman perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Guru menjadi panutan dalam membentuk karakter siswa, karena panutan terbukti lebih efektif daripada presentasi verbal. Melalui kebiasaan positif di sekolah dan universitas, siswa dapat menyadari bahwa perilaku anti-korupsi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Namun, implementasi pendidikan anti-korupsi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesadaran moral yang rendah, panutan yang lemah, dan pengaruh lingkungan sosial yang cenderung mentolerir perilaku tidak jujur. Lebih jauh lagi, perilaku menyimpang masih terlihat di lingkungan pendidikan, seperti plagiarisme, ketidakhadiran, dan kurangnya disiplin, yang menunjukkan internalisasi nilai-nilai anti-korupsi yang belum optimal (Nadhifah, 2026). Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pembentukan karakter anti korupsi.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan karakter anti-korupsi pada generasi muda. Melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter, dan pembelajaran kontekstual, siswa dapat mengembangkan kesadaran moral, integritas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan anti korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang kuat, sehingga mampu berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang bebas dari korupsi.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter anti korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia, karena implikasinya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak etika kolektif bangsa, menghambat proses pembangunan, dan merusak kepercayaan publik

terhadap pemerintah. Berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi masalah sistemik yang sulit diberantas, karena rendahnya tingkat integritas, moralitas, dan kesadaran publik terhadap nilai-nilai penting kejujuran dan tanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran generasi muda tentang budaya anti-korupsi melalui pendekatan moral dan budaya. Nilai-nilai anti-korupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan kesadaran sosial, dapat diinternalisasi melalui proses pembelajaran interaktif dan kontekstual. Selain itu, pendidikan anti-korupsi juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan berperan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Di tingkat sekolah dasar, penerapan pendidikan anti korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting sejak usia dini. Guru memainkan peran sentral dalam menanamkan nilai kejujuran dan menyampaikan kepada siswa pemahaman bahwa korupsi adalah perilaku tercela yang merugikan berbagai pihak (Humaira et al., 2021). Pendidikan anti korupsi sejak usia dini bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar terakulturasi dengan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga mereka mampu menghindari perilaku korupsi di masa depan.

Integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan

Pendidikan anti-korupsi pada dasarnya merupakan integrasi pendidikan karakter dan pendidikan nilai-nilai, yang menekankan pengembangan individu yang jujur, berbudi luhur, dan bertanggung jawab. Studi tentang pendidikan anti-korupsi berbasis Islam menjelaskan bahwa pendidikan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan tetapi juga sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran moral dan sikap kritis terhadap perilaku korupsi (Gufron, Dewi Chamidah, 2025).

Integrasi pendidikan anti-korupsi dapat dicapai melalui pengembangan materi pembelajaran, metode, media, dan budaya sekolah. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai anti-korupsi dapat diintegrasikan ke dalam diskusi tentang demokrasi, hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai Pancasila. Proses pembelajaran menekankan tidak hanya dimensi kognitif tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku siswa, sehingga mereka mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Integrasi pendidikan anti-korupsi berbasis Islam ke dalam kurikulum Al-Quran dan Hadits memberikan kontribusi signifikan terhadap internalisasi nilai-nilai anti-korupsi pada siswa. Pembelajaran dilakukan dengan menghubungkan materi keagamaan dengan nilai-nilai integritas, kepercayaan, dan larangan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadits menjadi landasan utama untuk membangun kesadaran moral siswa dan menjauhkan mereka dari perilaku korupsi (Smeer et al., 2023).

Pendidikan anti-korupsi perlu diimplementasikan melalui budaya sekolah dan lingkungan pendidikan. Kebiasaan disiplin, transparansi, tanggung jawab, dan

kejujuran dapat ditanamkan melalui peraturan sekolah, teladan guru, dan kegiatan organisasi siswa. Pendidikan anti-korupsi akan efektif secara optimal jika semua elemen sistem pendidikan terlibat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung budaya integritas.

Pembelajaran menggunakan metode project citizen juga mampu membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan keterlibatan aktif siswa untuk menyelesaikan masalah sosial terkait korupsi di komunitas mereka. Proses pembelajaran ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, perumusan solusi, dan penyajian hasil secara partisipatif. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menguasai konsep anti-korupsi secara teoritis tetapi juga menginternalisasikannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari mereka (Mulyoto, 2020).

Peran pendidikan karakter dan nilai keagamaan dalam pencegahan korupsi

Korupsi pada dasarnya didorong bukan hanya oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh kelemahan moral dan integritas individu. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran anti-korupsi. Sebuah studi tentang pendidikan anti-korupsi berbasis Islam menjelaskan bahwa perilaku korupsi dapat dicegah melalui internalisasi nilai-nilai agama yang menekankan kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab (Gufron, Dewi Chamidah, 2025).

Pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan intrinsik dalam membentuk karakter siswa. Pendidikan Islam secara khusus bertujuan untuk membentuk individu dengan karakter mulia dan menghindari perilaku menyimpang, termasuk korupsi. Dalam perspektif Islam, korupsi adalah manifestasi pengkhianatan amanah dan termasuk dalam kategori perilaku yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai agama menjadi unsur penting dalam membangun karakter anti-korupsi.

Lingkungan pendidikan seperti pesantren dan universitas Islam memainkan peran strategis dalam menumbuhkan budaya integritas. Pendidikan anti-korupsi berbasis Islam efektif dalam membantu siswa memahami dampak buruk korupsi dan menumbuhkan kesadaran moral untuk menolak perilaku korupsi (Gufron, Dewi Chamidah, 2025). Siswa tidak hanya memperoleh pemahaman tentang aspek hukum korupsi tetapi juga mengembangkan nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi dasar perilaku anti-korupsi.

Jadi bisa dikatakan pendidikan karakter dan nilai-nilai agama merupakan landasan utama strategi pencegahan korupsi. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral, integritas, dan kesadaran spiritual, diharapkan akan muncul generasi muda yang berkarakter kuat, mampu bertindak sebagai agen perubahan dalam membentuk masyarakat yang bersih, adil, dan bebas korupsi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembasana diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memainkan peran strategis yang penting dalam membentuk karakter anti-korupsi di kalangan generasi muda. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga krisis moral dan karakter dengan implikasi yang luas bagi kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi yang penting diimplementasikan melalui pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, integritas, dan kepedulian sosial sejak usia dini. Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran penting sebagai media untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila guna menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap berbagai manifestasi perilaku korupsi. Selain itu, pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, dan nilai-nilai agama dapat memperkuat pembentukan karakter siswa, sehingga diharapkan akan muncul generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan moral dan etika yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Untuk saran, penguatan implementasi pendidikan anti-korupsi dalam mata pelajaran Kewarganegaraan di semua tingkatan pendidikan sangat diperlukan. Para pendidik diharapkan mampu menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual, interaktif, dan berbasis nilai, sehingga siswa tidak hanya menguasai konsep anti-korupsi secara teoritis tetapi juga menginternalisasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu memperkuat implementasi pendidikan anti-korupsi dalam mata pelajaran Kewarganegaraan di semua tingkatan pendidikan. Para pendidik diharapkan menerapkan metode pembelajaran kontekstual, interaktif, dan berbasis nilai, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep anti-korupsi secara teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abqoriya, R. (2025). *Peran agama dan nilai spiritual dalam melawan korupsi*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24645/>
- Gufron, Dewi Chamidah, A. F. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Vol. 6, Number 0). <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Humaira, J., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tembusai*, 5(3), 8612–8620.
- Mimin Ninawati, Arifatul Adawiyah, Ike Nuryolanda, Maura Febriyanti Zulkarnain, Siti Afifah Fadhilah, S. N. A. (2025). Membangun Karakter Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 1433–1442.
- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80.

- Nadhifah, M. J. (2026). Pancasila sebagai moral foundation dalam pencegahan korupsi di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 4, 326–334.
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah*, 9(2), 51–62.
- Smeer, Z. B., Mubasyiroh, & Hamim. (2023). Integrasi Pendidikan Anti korupsi Berbasis Islam dalam Mata Kuliah Studi Al-Qur'an dan Hadis (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9. <https://repository.uin-malang.ac.id/17455/>